

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

**PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
DALAM BELANJA DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten Musi Banyuasin)**



**Skripsi Oleh :
AGLIN JENOVA
NIM. 01053130002**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2009**

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2009

Skripsi Oleh :
AGLIN JENOVA
NIM. 01053130002



PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
DALAM BELANJA DAERAH
(Studi Kasus pada Kabupaten Musi Banyuwasin)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

336.000 2
2009
Aglin Jenova

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

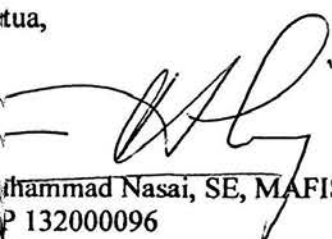
TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF


N A M A : AGLIN JENOVA
N I M : 01053130002
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN DALAM BELANJA DAERAH (Studi
Kasus pada Kabupaten Musi Banyuasin)

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 4 Mei 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 4 Mei 2009

tua,



Muhammad Nasai, SE, MAFIS, Ak
NIP 132000096

Anggota,

Yulia Seftiana, SE, M.Si, Ak
NIP 132000091

Anggota,

Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak
NIP 132093577

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP 131801649

MOTTO:

- **Selalu Berusaha dan Berdoa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dan Apabila apa yang sudah direncanakan dan diimpikan tidak terwujud dengan sukses, maka langkah yang paling baik adalah berusaha untuk IKHLAS dan BERTAWAKAL pada Allah SWT.**
- **Waktu kamu lahir, kamu menangis dan orang-orang di sekelilingmu tersenyum. Jalanilah hidupmu dengan sebaik-baiknya dan jadilah yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga pada waktu kamu meninggal, kamu tersenyum dan orang-orang di sekelilingmu menangis.**
- *We Can Take From Our Life Up To What We Put To It.*
- *Trying is a part of failing. If you are afraid to fail then you're afraid to try.*

Kupersembahkan Untuk:

- *Kedua Orangtua Tercinta*
- *Kakak-Kakakku*
- *Semua Keluargaku*
- *Teman-Teman*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Universitas Sriwijaya, yang diberi judul **“Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Musi Banyuasin)”**.

Berhasilnya penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada :

1. Bapak Dr. H. Syamsurijal, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2. Bapak Drs. Burhanuddin M. Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana. DP, SE, MM, Ak, sebagai dosen pembimbing akademik, terimakasih untuk segala nasehat dan bimbingannya.
4. Bapak Muhammad Nasai, SE, MAFIS, Ak, Ketua pembimbing skripsi.
5. Ibu Yulia Seftiana, SE, M.Si, Ak, Anggota pembimbing skripsi
6. Kedua orang tuaku tercinta, untuk kasih sayang tak terhingga.
7. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi. Untuk keikhlasan hati dalam mendidik dan memberikan ilmunya.

Semua pihak yang banyak membantu hingga terselesaikannya laporan akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebbaikannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Penulis
Aglin Jenova

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho yang dikaruniakan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Musi Banyuasin)” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Drs. Burhanuddin M. Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Muhammad Nasai, SE, MAFIS, Ak, Ketua pembimbing skripsi.
3. Ibu Yulia Seftiana, SE, M.Si, Ak, Anggota pembimbing skripsi
4. Ibu Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak, sebagai dosen tamu dalam ujian komprehensif.
5. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana. DP, SE, MM, Ak, sebagai dosen pembimbing akademik, terimakasih untuk segala nasehat dan bimbingannya.
6. Bapak Aryanto Dina, SE, Ak, yang telah memberikan ide bagi penulis untuk menulis skripsi ini.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah memberikan dukungan moril, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan pendanaan.
9. Sahabat terbaikku, Asiest, *Thanks for everything that you has given to me, for all spirit, motivation, laugh and smile that can make me strength.* Terima kasih untuk selalu memberi doa, memberikan semangat optimisme, dan motivasi yang tinggi untuk menjadi *”better than before”*.
10. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Kak Adi dan Kak Heru) terimakasih atas bantuannya memperlancar mengurus semua masalah administrasi.
11. “GMR member” (Apri, Duma, Aisyah, Diah, Rizky), *Thanks for all story, laugh, and smile that we share together. I will miss you all so much.*

12. Teman seperjuangan (Ira, Tinda, Aisyah, Eka, Indra) untuk kebersamaannya selama kurang lebih 3 bulan, yang memberikan motivasi dan *support*. Kalianlah pemicu bagiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini. *Hope our dream will be come true!!!*

13. Teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2005, terimakasih untuk berbagi ilmu dan cerita. Setiap momen yang kita lalui bersama, akan menjadi kenangan indah dalam hidupku.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Amin.

Penulis,
Aglin Jenova

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Konsep Anggaran Sektor Publik	14
2.1.1. Pengertian Anggaran	14
2.1.2. Anggaran Sektor Publik	15
2.1.3. Fungsi Anggaran Sektor Publik	15
2.1.4. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	18
2.1.5. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik.....	18
2.1.6. Pentingnya Anggaran Sektor Publik	20
2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	21
2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah	21
2.2.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	22
2.2.3. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	22
2.2.4. Tugas Pengelola Keuangan Daerah.....	24
2.2.5. Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah	25
2.2.6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	25
2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	28
2.3.1. Pengertian APBD	28
2.3.2. Asas Umum dan Fungsi APBD.....	28
2.3.3. Ketentuan Penyusunan APBD	30
2.4. Struktur APBD	30
2.4.1. Struktur APBD Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.....	31
2.4.2. Struktur APBD Menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan	35
2.4.3. Struktur APBD Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	37
2.5. Era Desentralisasi Fiskal	41

2.5.1.	Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Fiskal.....	41
2.5.2.	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam Belanja Daerah dengan Konsep Rasio Keuangan.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

3.1.	Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin.....	50
3.1.1	Sejarah Umum Kabupaten Musi Banyuasin	50
3.1.2	Letak dan Keadaan Alam	50
3.1.3	Luas Wilayah.....	51
3.2.	Visi, Misi dan Rencana Strategis	52
3.2.1.	Visi	52
3.2.2.	Misi.....	53
3.2.3.	Rencana Strategis	54
3.3.	Struktur Organisasi.....	56
3.4.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin	62
3.4.1.	Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin	64
3.5.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin	67
3.5.1.	Komponen Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) Kabupaten Musi Banyuasin.....	70
3.6.	Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	72
3.6.1.	Komponen Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	74
3.7.	Kondisi Keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Musi Banyuasin	80

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.....	89
4.2.	Analisis Trend Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah	98
4.3.	Analisis Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.....	103
4.4.	Analisis Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	118
5.2.	Saran.....	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Luas Daerah, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	52
Tabel 3.2. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004	81
Tabel 3.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2005	83
Tabel 3.4. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2006	85
Tabel 3.5. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2007	87
Tabel 4.1. Perhitungan Rasio PAD terhadap Belanja Daerah	90
Tabel 4.2. Kontribusi Sumber-sumber PAD dalam Pembentukan PAD	91
Tabel 4.3. Perhitungan Rumus Trend PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	99
Tabel 4.4. Perhitungan Trend PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	100
Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	104
Tabel 4.6. Kontribusi Sumber-sumber Dana Perimbangan Dalam Pembentukan Dana Perimbangan	105
Tabel 4.7. Perhitungan Rumus Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	115
Tabel 4.8. Perhitungan Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	115

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah	91
Grafik 4.2. Trend PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	101
Grafik 4.3. Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.....	104
Grafik 4.4. Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	116

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Musi Banyuasin)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin, 2) menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin, 3) mengetahui perkembangan tingkat kemandirian yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Musi Banyuasin.

Hasil penelitian pada pemerintah daerah Musi Banyuasin pada periode tahun 2004-2007 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Namun Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, adanya peningkatan trend PAD terhadap belanja daerah menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kemajuan meskipun masih dalam tingkat yang cukup rendah.

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyarankan agar pihak pemerintah daerah perlu menggali potensi - potensi yang berasal dari daerahnya sendiri dan berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan



**Regional Original Income and Proportion Grant on Regional Expenditure
(Case Study in County of Musi Banyuasin)**

ABSTRACT

This research aims to 1) analyze whether there are influences regional original income to regional expenditure; 2) analyze whether there are influences proportion grant to regional expenditure; 3) know how the development of regional autonomy in Musi Banyuasin.

The findings in Musi Banyuasin, from the year 2004 to 2007, shows that regional original income and proportion grant that impact on regional expenditure. However, regional original income doesn't have significant influences to regional expenditure, whereas proportion grant has significant influences to regional expenditure. In addition, increase of regional original income trend, show that there are the improvement of autonomy level of Musi Banyuasin, although in low level.

Based on the analysis, writer suggests government of Musi Banyuasin must increase efforts to discover regional economic potential and decrease dependence on central government to finance its regional expenditure.

Keywords: regional expenditur, regional original income and proportion grant.



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah* dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Undang-undang ini diberlakukan untuk memberikan peluang bagi daerah dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan kapasitas otonomi yang dimiliki.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius terutama dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung berupa sarana dan

prasarana yang dibutuhkan. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang sesuai untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2005) dalam Harianto menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) dalam Harianto mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Undang - undang No. 25 Tahun 1999 menegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan sumber pendanaan tersebut diserahkan ke pemerintah daerah. Sumber pendanaan tersebut seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001 dalam Ndadari).

Dampak langsung atas penerapan otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD, yang dipakai untuk membiayai belanja pemerintah daerah berupa belanja langsung dan tidak langsung. Namun, dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Kebijakan otonomi daerah memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) daripada mengoptimalkan pendapatan sendiri (PAD) untuk membiayai belanja daerahnya.

Menurut Adi (2006) dalam Ndadari, proporsi dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus, terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2007) dalam Ndadari juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kenyataan ini tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk

mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001 dalam Yustikasari). Dalam upaya peningkatan kemandirian, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Sedangkan Kuncoro (2007) dalam Ndadari juga menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan belanja pemerintah yang tidak efisien. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin ?

2. Bagaimanakah pengaruh dana perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin ?
3. Bagaimanakah tingkat perkembangan kemandirian pemerintah daerah Musi Banyuasin ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan masalah yang timbul seperti yang telah diungkapkan di atas adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin.
2. Untuk menganalisa pengaruh dana perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin.
3. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Musi Banyuasin.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat seperti :

1. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

3. Bagi akademisi, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam.
4. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama..

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun tidak (Indriantoro & Supomo, 2002:147).

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah :

1. Sejarah singkat Kabupaten Musi Banyuasin
2. Gambaran umum wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Struktur organisasi Kabupaten Musi Banyuasin
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2004-2007

Data yang digunakan diperoleh dari :

1. Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin
2. Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. Kantor Arsip Daerah Musi Banyuasin
4. Instansi-instansi terkait lainnya

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari sumbernya. Adapun cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Dengan menggunakan, mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi lapangan (*Field Research*)

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu teknik dokumentasi, yaitu melalui penyelidikan sumber dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan mencari data berupa APBD atau laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Musi Banyuasin.

1.4.3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah Musi Banyuasin. Objek penelitian yang akan digunakan adalah struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau laporan realisasi anggaran kabupaten Musi Banyuasin dalam era otonomi daerah, yaitu tahun 2004 – 2007.

1.4.4. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat disimpulkan suatu jawaban permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua cara yaitu :

1. Analisis Kuantitatif

Yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data finansial. Data finansial ini berupa ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2004 – 2007.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio dan analisis trend.

1. Analisis Rasio

Rasio – rasio yang digunakan dalam metode analisis ini antara lain :

- a) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah :

$$R_{PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Belanja Daerah}}$$

- b) Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Pemerintah Daerah :

$$R_{DP} = \frac{\text{Dana Perimbangan (DP)}}{\text{Belanja Daerah}}$$

- c) Mengukur Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Daerah

$$\triangleright \text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi DP} = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

- d) Mengukur Kontribusi Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah

$$\triangleright \text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi HPKD} = \frac{\text{Realisasi HPKD}}{\text{Total PAD}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi Lain – lain PAD} = \frac{\text{Realisasi Lain – lain PAD}}{\text{Total PAD}}$$

Keterangan :

HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- e) Mengukur Kontribusi Sumber – sumber Dana Perimbangan dalam pembentukan Dana Perimbangan

$$\triangleright \text{Kontribusi BHP & BHBP} = \frac{\text{Realisasi BHP & BHBP}}{\text{Total DP}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total DP}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi DAK} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total DP}}$$

$$\triangleright \text{Kontribusi BHP & BKP} = \frac{\text{Realisasi BHP & BKP}}{\text{Total DP}}$$

Keterangan :

BHP & BHBP = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
BHP & BKP	= Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi

2. Analisis Trend

a) Trend PAD terhadap Belanja Daerah

Analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

- Y' = Perkembangan tingkat rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
- Y = Variabel rasio PAD terhadap belanja daerah
- a = konstanta (nilai Y pada saat X=0)
- b = kemiringan / trend (koefisien perubahan nilai Y karena perubahan nilai X)
- X = Waktu

b) Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

- Y' = Perkembangan tingkat rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah
- Y = Variabel rasio dana perimbangan dalam belanja daerah
- a = konstanta (nilai Y pada saat X=0)
- b = kemiringan / trend (koefisien perubahan nilai Y karena perubahan nilai X)
- X = Waktu

2. Analisis Kualitatif

Yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh dari objek penelitian serta membandingkannya dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku umum. Jadi analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis angka – angka hasil perhitungan di atas dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam analisis kuantitatif.

1.5. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulis menyusun skripsi ini secara sistematika yang terbagi menjadi lima bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta teknik analisis yang digunakan dalam menghitung dan mengukur pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dasar anggaran sektor publik, proses penyusunan dan penetapannya, pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, komponen – komponen yang terdapat dalam APBD, serta konsep analisis yang digunakan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya kabupaten Musi Banyuasin, kondisi geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan kondisi keuangan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengungkapkan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi anggaran kabupaten Musi Banyuasin dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai upaya dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Jhon Andra Asmara. 2006. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor publik*. Simposium Nasional Akuntansi ke IX : Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansni Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. Surabaya : Konferensi Nasional ke-2 UKWMS.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur, Indrianto dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Yustikasari, Yulia dan Darwanto. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Yogyakarta.

Yuwono, Sony dan Tengku Agus Indrajaya. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.